

MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023



TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U6 Dengan Nilai 305; 2. U5 Dengan Nilai 309; 3. U4 Dengan Nilai 310; 	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Unsur Hadiah (U6)	<p>> Unsur Hadiah merupakan Unsur ke 6 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (Meskipun tidak diminta) ? 	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk tidak merima tanda terima kasih berupa apapun dari pengguna layanan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisis dari 79 responden terdapat nilai yaitu : Selalu sebanyak 2 responden, Sering sebanyak 1 responden, Jarang sebanyak 3 Responden, dan Tidak ada sebanyak 73 Responden ; 	
2	Unsur Biaya Tambahan (U5)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah di pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ? - Hasil analisis dari 79 responden terdapat nilai : Selalu sebanyak 1 Responden, Sering sebanyak 0 Responden Jarang sebanyak 4 Responden, dan Tidak ada sebanyak 74 Responden; 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia akses informasi mengenai tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri Palembang ➤ Petugas PTSP selalu memberikan kwitansi / Tanda Terima pada setiap transaksi yang dilakukan;

3	Unsur Transparasi Biaya (U4)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? - Hasil analisis dari 223 responden terdapat nilai Selalu sebanyak 1 Responden, Sering sebanyak 0 Responden Jarang sebanyak 3 Responden, dan Tidak ada sebanyak 75 Responden ; 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia biaya / tarif pada papan pengumuman dan tercantun pada standar pelayanan yang dapat dilihat melalui website Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta petugas PTSP pun akan memberitahukan biaya biaya resmi terkait pelayanan yang ada biayanya ;
---	-------------------------------------	---	---

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-II Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

Eviden tindakan lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1



BRIEFING PETUGAS PTSP

Point 2

Prosedur Berperkara
Berisikan Menu Tata Cara atau Prosedur Pendaftaran Gugatan, Permohonan, Biaya Serta Biaya Yang Diperlukan Untuk Berperkara Pada Pengadilan Negeri Palembang

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN MEI 2023 - Rabu, 26 Jun 2023

Menu Layanan Publik

- PELAYANAN INFORMASI PERKARA
- PROSEDUR BERPERKARA
- Prosedur Pidana
- Prosedur Perdata
- Biaya Perkara**
- PERMOHONAN INFORMASI

Biaya Perkara

Biaya Perkara Pengadilan Negeri Palembang

- S.K. PANJAR_BIAYA_PERDATA_2023.pdf
- Surat Pemberitahuan Sisa Panjar PN Palembang.pdf

Screen Reader

BIAYA PERKLARA PADA WEBSITE

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Jalan Kapten A. Rival No. 16 Palembang
Telp (0711) 363310-313555 Fax : (0711)313555 Website : www.pn-palembang.go.id
Email : pn-palembang@gmail.com / pn-palembang@yahoo.com

TANDA TERIMA 1106

Telah terima dari : *Rizka Fadli*
Uang sebesar : Rp. *12.000* (*Sepuluh Ribu Rupiah*)

Guna membayar : Pendaftaran Surat Kuasa Akte Notaris Legalisir
 Salinan Putusan Surat Keterangan Warmerking
 Pengesahan Akta dibawah tangan Lain-lain.....

Dengan perincian :

<input checked="" type="checkbox"/> P N P B	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Photocopy @ lembar	: Rp. 300,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-	<input type="checkbox"/> Sampul	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Ongkos Photocopy	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Penyerahan Salinan	: Rp. 500,-	<input type="checkbox"/> Biaya Jilid	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Putusan @ lembar	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/>	: Rp.
<input type="checkbox"/> Leges		<input type="checkbox"/>	
@ Putusan/Penetapan			

KASIR
H
(.....)
NIP.

Palembang, *5 Juli 2023*
Petugas Meja Informasi
Hukum
[Signature]
(.....)

KWITANSI / TANDA TERIMA BIAYA

Point 3

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No 16 Palembang
Telepon/Fax (0711) 313555 - 363310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾
search...

BerAKHLAK #bangga
melayan bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pimpinan & seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang berkor...
mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, Khususnya c...
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
Peraturan dan Kebijakan
Prosedur Pembebasan
Biaya Perkara (Predeo)
Posbankum

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DAN BIAYA PERKARA
Prosedur Pengajuan
Perkara
Biaya Perkara

ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN
Pimpinan dan Seluruh Jajarannya Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi, Khususnya Dalam Hal Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

BEBAS KORUPSI
Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- Bebas dari Korupsi
- Bebas dari Gratifikasi
- Bebas dari Pengutan liar (Pungli)

PELAYANAN PRIMA
Terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

BIAYA PERKARA PADA WEBSITE



Standar Pelayanan



Daftar biaya sesuai radius